

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1.	Kuisisioner	122
2.	Karakteristik Anggota Gapoktan Tani Lumintu di Desa Panggung	135
3.	Skor Peranan Pemimpin Gapoktan pada Program PUAP di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, 2011	138
4.	Skor Kinerja Gapoktan Tani Lumintu pada Program PUAP di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, 2011	141
5.	Perhitungan Korelasi antara Peranan Pemimpin Gapoktan dengan Kinerja Gapoktan pada Program PUAP di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, 2011.....	145
6.	Perhitungan Korelasi antara Peranan Pemimpin Gapoktan dengan Kinerja Gapoktan dalam Pemenuhan Permodalan Usahatani pada Program PUAP di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, 2011	148
7.	Perhitungan Korelasi antara Peranan Pemimpin Gapoktan dengan Kinerja Gapoktan dalam Pemenuhan Sarana Produksi pada Program PUAP di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, 2011... ..	151
8.	Perhitungan Korelasi antara Peranan Pemimpin Gapoktan dengan Kinerja Gapoktan dalam Penyampaian Informasi Teknologi Baru Usahatani di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, 2011.....	153
9.	Perhitungan Korelasi antara Peranan Pemimpin Gapoktan dengan Kinerja Gapoktan dalam Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Usahatani, di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, 2011.....	155
10.	Perhitungan Korelasi antara Peranan Pemimpin Gapoktan dengan Kinerja Gapoktan dalam Pemasaran Hasil Usahatani di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.....	158
11.	Perkembangan Modal dan Petani Penerima PUAP di Gapoktan Tani Lumintu Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, 2011.....	160
12.	Dokumentasi Penelitian.....	161

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini yaitu kemiskinan. Dengan populasi penduduk 228,5 juta jiwa namun sebesar 37,2 juta jiwa tergolong ke dalam masyarakat miskin. Sekitar 63,4% dari jumlah masyarakat miskin tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada di sektor mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 Ha (BPS, 2007). Data BPS (2010) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada maret tahun 2009 berjumlah 32,53 juta 14,15 % dan pada maret tahun 2010 sebesar 31,02 juta orang atau 13,33 %, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa namun permasalahan kemiskinan masih ada dan dirasakan oleh masyarakat.

Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal ini diperkuat oleh pendapat Soetrisno (1998) bahwa mayoritas penduduk negara-negara yang sedang berkembang adalah petani. Oleh karena itu, pembangunan pertanian haruslah merupakan tujuan utama dari setiap pemerintahan negara yang sedang berkembang. Hadisapoetro (1973) menyatakan bahwa pelaksana utama pembangunan pertanian di Indonesia justru petani-petani kecil, yang merupakan bagian terbesar, baik dipandang dari sudut jumlah luas usahatani yang diusahakannya, ataupun dipandang dari sudut jumlah dan nilai produksi yang dihasilkan. Untuk itu, setiap upaya dalam pembangunan pertanian yang sedang atau akan dilaksanakan di Indonesia harus selalu memperhatikan petani kecil sebagai sasaran utama yang harus diperbaiki kualitas hidupnya.

Berdasarkan data Deptan (2006) dalam Ade Nurmarita (2009) kemiskinan di Indonesia disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian, diantaranya: (1). Sulitnya aksesibilitas terhadap modal; (2). Jumlah lahan petani yang terbatas; serta (3). Pendidikan petani yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah

sejak sebelum reformasi. Namun pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, banyak tujuan program yang tidak tercapai.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan modal kepada Gapoktan yang terdapat di desa miskin atau tertinggal yaitu program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di pedesaan dengan memberikan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. Struktur PUAP terdiri dari Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) sehingga dapat lebih memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima dana PUAP sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP tentunya menjadi salah satu penentu sekaligus indikator bagi keberhasilan program PUAP itu sendiri. Anggaran PUAP untuk tahun 2008 mencapai Rp 1,1 triliun, masing-masing desa yang terpilih akan mendapatkan dana PUAP sebesar Rp 100 juta.

Pada tahun 2009 Kementerian Pertanian telah menyalurkan dana PUAP sebesar ± Rp. 988,304 milyar kepada 9.884 desa/Gapoktan di 421 kabupaten/kota pada 33 propinsi seluruh Indonesia. Gapoktan penerima dana PUAP diharapkan dapat mengelola dana PUAP melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, usaha otonom simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro. Dalam pelaksanaan program PUAP Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan dana PUAP sesuai dengan RUB (Rencana Usaha Bersama) sehingga menjadi dasar penilaian terhadap Gapoktan PUAP yang berprestasi. Penilaian kepada Gapoktan berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi Gapoktan yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha agribisnisnya sekaligus dapat mengelola dana PUAP melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, usaha otonom atau Lembaga Keuangan Mikro. Dengan penghargaan tersebut, diharapkan Gapoktan PUAP terdorong untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP

yaitu mampu sebagai unit usahatani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran, unit usaha keuangan mikro.

Permasalahan kelembagaan acapkali ditemui, baik kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Di tingkat makro, satu kelembagaan baru yang akan lahir adalah Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai lembaga pemerintah non departemen, yang akan merumuskan secara terperinci tentang metode penyuluhan, strategi penyuluhan dan kebijakan penyuluhan. Di tingkat mikro, akan dibentuk beberapa lembaga baru, misalnya Pos Penyuluhan Desa dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Departemen Pertanian menargetkan akan membentuk satu Gapoktan disetiap desa khususnya yang berbasis pertanian. Saat ini, Gapoktan diberi pemaknaan baru, termasuk bentuk dan peran yang baru. Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gateway institution*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan ekonomi pedesaan yang di dalamnya bergabung beberapa kelompok tani. Penggabungan tersebut didasarkan kepada wilayah kerja, jenis komoditi, kesamaan orientasi usaha atau kombinasi dari faktor tersebut, sehingga mampu menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antar kelompok tani. Pengembangan kelompok tani menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Gapoktan sebagai aset kelembagaan dari Kementerian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani di pedesaan. Sejalan dengan format penumbuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi kelembagaan tani di pedesaan sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007, maka Gapoktan penerima BLM PUAP 2008 harus dapat dibina dan ditumbuhkan menjadi lembaga ekonomi ataupun lembaga keuangan mikro agribisnis sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan sehingga dapat mengelola dan melayani pembiayaan bagi petani anggota secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai penyalur bantuan modal usaha bagi anggota, dan diharapkan Gapoktan dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi petani yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) milik petani di 10.000 desa. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan mikro bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal maupun informal. Jasa keuangan mikro yang dikelola oleh LKM tersebut antara lain berupa pemberian pinjaman (kredit), penghimpunan dana (tabungan) yang terkait dengan persyaratan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya. Lembaga keuangan Mikro (LKM) PUAP yang berkembang diharapkan dapat membantu dan mengakomodasikan kebutuhan petani dan masyarakat miskin, baik untuk kegiatan mikro yang produktif (*on farm* dan *off farm*) maupun kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin yang sangat mendesak dan memiliki alasan kuat untuk dibantu. Kelembagaan Gapoktan pengelola PUAP diproyeksikan untuk dapat menjadi jejaring badan layanan umum pembiayaan pertanian dan perbankan serta bank pertanian (LKM Prima Tani, 2009).

Banyaknya kasus terkait penyaluran dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebesar Rp. 100 juta per desa dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) semakin gencar di kalangan masyarakat. Hal tersebut muncul saat beredarnya informasi tentang adanya bantuan yang digulirkan pemerintah tersebut telah diserahkan kepada masing-masing Gapoktan namun di lapangan tidak dirasakan oleh para petani. Atau ketika dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan disalurkan kepada petani, dana PUAP tersebut tidak digunakan untuk membantu kegiatan usahatani ataupun kegiatan produktif lainnya oleh para petani tetapi digunakan untuk pembiayaan infrastruktur atau kebutuhan hidup lainnya. Kekecewaan lainnya, datang dari masyarakat yang tidak mendapatkan dana PUAP, karena sosialisasi dari pemerintah atau Dinas Pertanian singkat sehingga masyarakat tidak mengetahui dana PUAP tersebut. Bahkan lebih ironisnya lagi, ketika dana PUAP disalurkan kepada petani, tidak ada monitoring dan evaluasi dari pemerintah

ataupun Dinas Pertanian sehingga dana habis dan tidak berkembang, padahal sifat dana PUAP tidak seperti BLT yang diberikan tanpa ada kompensasi apa pun.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peranan petani dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), khususnya dalam memecahkan berbagai permasalahan pertanian maupun pembangunan dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dipilihlah seorang pemimpin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pemimpin Gapoktan adalah orang yang dianggap mampu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin serta mengarahkan dan mengawasi atau mengendalikan Gapoktan yang ada di kelurahan atau desanya, sehingga seorang pemimpin Gapoktan harus bertanggungjawab dalam pengelolaan usaha tani yang dilakukan anggotanya. Pemimpin Gapoktan ini bekerjasama dengan penyuluh pertanian dan penyelia dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok yang dipimpinnya.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan terbentuk pada tahun 2007, yaitu sejak adanya sosialisasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Dalam pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebut sekaligus dipilih pemimpin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ditentukan dan disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam usaha kelompok melalui manajemen yang profesional. Pemimpin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dipilih menurut kesepakatan anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam satu desa untuk mewakili aspirasi petani dalam forum kelembagaan di tingkat wilayah yang lebih tinggi.

Pelaksanaan program PUAP di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan sudah pada tahap pengembalian modal ketiga. Berdasarkan survei pendahuluan, fakta yang ada di lapang total petani di wilayah tersebut sebanyak 426 petani (tidak termasuk buruh tani dan peternak) namun yang menerima dana BLM PUAP sebanyak 118 petani, hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana BLM PUAP belum menyeluruh. Selain itu pengelolaan modal BLM-PUAP yang diterima oleh Gapoktan masih belum maksimal, hal ini terlihat dari usaha pengelolaan modal BLM PUAP yang masih sebatas jasa bunga simpanan anggota penerima BLM PUAP disetiap pengembalian dana PUAP.

Kurangnya pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menyebabkan kurang berjalannya program sesuai tujuan yang ditetapkan. Sehingga dikhawatirkan setelah program tersebut selesai, Gapoktan di wilayah tersebut juga mengalami penurunan baik kuantitas dan kualitas.

Pemimpin Gapoktan ini berasal dari kelompok atau yang biasa disebut dengan pemimpin situasional, yaitu seorang ketua kelompok yang ada di kelurahan atau desa yang telah ditunjuk sebagai daerah yang akan menjadi lokasi penerapan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Bagi orang yang dipilih menjadi pemimpin kelompok mewakili desa atau kelurahannya mengikuti pelatihan terkait program maupun usahatani yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam menggali, menganalisis permasalahan kepemimpinan dan usahatannya, membantu memfasilitasi pengelolaan usahatani dan pemasaran hasil produksi kelompok secara efisien dan profesional, membina kelompok tani guna mewujudkan kegiatan usahatani yang berdaya guna dan berorientasi pada kesejahteraan.

Dalam kenyataannya setiap pemimpin memiliki peranan yang lebih luas untuk menggerakkan kelompok tani menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam menerapkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tersebut tidak akan dapat berjalan dengan sempurna apabila tidak diiringi pembinaan dan arahan dari pihak-pihak terkait yang secara langsung menangani program tersebut. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Gapoktan membutuhkan peranan seorang pemimpin Gapoktan yang mampu untuk merealisasikan tercapainya tujuan bersama seiring dengan berjalannya fungsi dengan baik dan selalu dapat memperhatikan setiap kebutuhan dari kelompoknya.

Pengembangan Gapoktan merupakan suatu proses lanjut dari lembaga petani yang sudah berjalan baik, yaitu kelompok-kelompok tani. Gapoktan diposisikan sebagai institusi yang mengkoordinasi lembaga-lembaga fungsional di bawahnya yaitu para kelompok tani. Untuk dapat berkembang sistem dan usaha agribisnisnya, memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani maupun kelembagaan usaha dengan fungsi pemerintah yang sesuai dengan

perannya masing-masing. Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri.

Melihat permasalahan di atas, penelitian tentang peranan pemimpin Gapoktan yang dilakukan oleh ketua Gapoktan dalam pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan melalui kinerja yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan hal yang perlu diteliti. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “Peranan Pemimpin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), (Kasus di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemimpin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana kinerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan?
3. Apakah terdapat hubungan nyata antara peranan pemimpin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan kinerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peranan pemimpin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

2. Mendeskripsikan kinerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
3. Menganalisis hubungan antara peranan pemimpin Gapoktan dengan kinerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan bidang pertanian sehubungan dengan pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk perbaikan peranan pemimpin Gapoktan dan kinerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
3. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau penelitian yang sama pada lokasi-lokasi yang berbeda, sehingga dapat dibuat generalisasi hasil penelitian yang lebih luas.